

MENGUKUR PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP PENANGANAN PATOLOGI SOSIAL DI DESA TEPPU

¹⁾Hariyanti Hamid*, ²⁾Muhammad Ikbal

^{1),2)}Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

¹⁾hariyantihamid2169@gmail.com ²⁾iqbal.sidrap@yahoo.com

*hariyantihamid2169@gmail.com

Abstrak

Penelitian Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam menangani patologi sosial berupa praktik judi sabung ayam di Desa Teppo, Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sidenreng Rappang. Isu utama penelitian ini berangkat dari fenomena keberlanjutan sabung ayam yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, sosial, serta lemahnya pengawasan, sehingga menciptakan kesenjangan antara regulasi formal dan realitas sosial di tingkat desa. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab patologi sosial dan menguji pengaruh implementasi kebijakan pemerintah terhadap upaya penanganannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan sampel 78 responden melalui teknik purposive sampling. Instrumen penelitian disusun berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III, Grindle, dan indikator implementasi kebijakan Indrajit. Data dikumpulkan melalui observasi, kuesioner, dan wawancara singkat, kemudian dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, analisis deskriptif, serta regresi linear sederhana dengan bantuan IBM SPSS 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama sabung ayam (42,4%), disusul faktor budaya (25,6%), faktor sosial (19,2%), dan lemahnya pengawasan (12,8%). Selain itu, implementasi kebijakan pemerintah terbukti berpengaruh signifikan terhadap penanganan patologi sosial (t hitung 2,307; sig. 0,024), meskipun nilai R^2 sebesar 0,065 menunjukkan kontribusi yang relatif kecil karena faktor ekonomi dan budaya lebih dominan. Penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan kebijakan yang integratif melalui intervensi ekonomi, strategi berbasis budaya, serta penguatan kapasitas implementasi di tingkat desa.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, patologi sosial, sabung ayam, masyarakat desa, kebijakan publik

Abstrak

This study provides a juridical analysis of the transformation of regional tax and levy regulations following the enactment of Law Number 1 of 2022 on Fiscal Relations between the Central Government and Regional Governments (the HKPD Law). This

normative legal research employs statutory and conceptual approaches. The analysis finds that the HKPD Law reform is centered on three main pillars: (1) the consolidation and simplification of tax types, including their integration into the Specific Goods and Services Tax (Pajak Barang dan Jasa Tertentu/PBJT); (2) central government intervention through the determination of Maximum Tariff Limits to maintain investment stability; and (3) innovation in regional revenue schemes through the replacement of the revenue-sharing mechanism with an opsen system on Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Transfer Fee to ensure regional liquidity certainty. Systemically, the HKPD Law has broad implications for other fiscal mechanisms. This transformation requires regional governments to adjust regulatory frameworks, administrative systems, and tax collection technologies to safeguard local own-source revenue potential and to optimize the quality of public service delivery.

Keywords: HKPD Law, Legal Politics, Regional Taxation, Fiscal Decentralization

PENDAHULUAN

Patologi sosial merupakan salah satu fenomena penyimpangan yang mengancam stabilitas sosial, terutama ketika tindakan yang melanggar norma hukum dan moral justru mendapatkan penerimaan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Studi-studi klasik dalam sosiologi menjelaskan bahwa patologi sosial muncul ketika individu atau kelompok gagal menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang berlaku sehingga menghasilkan perilaku menyimpang yang berlangsung secara konsisten (Hardiyanto et al., 2018; Hisyam, 2021). Di Indonesia, salah satu bentuk patologi sosial yang masih bertahan adalah praktik judi sabung ayam. Walaupun praktik ini secara tegas dilarang melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 serta pasal 303 KUHP, keberadaannya tetap mengakar di sejumlah wilayah karena terkait dengan struktur sosial, ekonomi, dan budaya lokal (Wagey, 2020).

Dalam beberapa komunitas, judi sabung ayam tidak sekadar dipandang sebagai aktivitas ilegal, tetapi juga menjadi bagian dari tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Basuki & Sudrajat (2017) menunjukkan bahwa sabung ayam memiliki makna simbolik yang berkaitan dengan status, relasi kuasa, dan struktur identitas kolektif masyarakat. Dalam konteks Desa Teppo, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, praktik ini dipertahankan melalui solidaritas sosial dan persepsi bahwa sabung ayam merupakan bentuk hiburan sekaligus ruang interaksi sosial masyarakat.

Fenomena keberlanjutan judi sabung ayam menunjukkan adanya masalah yang lebih mendasar pada aspek implementasi kebijakan publik. Edwards (1980) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat variabel: kejelasan komunikasi, kecukupan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Grindle (2017) menambahkan bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial-politik dan karakteristik kelompok sasaran. Sementara itu, indikator implementasi yang diukur dalam penelitian ini merujuk pada Indrajit, meliputi ketersediaan sumber daya, kejelasan pedoman, akurasi data dan informasi, kesesuaian pelaksanaan dengan rencana, hingga dampak kebijakan terhadap perubahan perilaku, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun terdapat kerangka regulatif yang kuat, terjadi kesenjangan implementasi (*implementation gap*) antara kebijakan penertiban perjudian dan kondisi aktual di Desa Teppo. Pengawasan yang lemah, keterbatasan kapasitas aparat desa, serta legitimasi budaya terhadap sabung ayam membuat kebijakan tidak berjalan efektif. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak meninjau sabung ayam dari perspektif antropologi budaya atau moralitas sosial, namun hanya sedikit studi yang mengkaji efektivitas implementasi kebijakan pemerintah desa dalam menangani patologi sosial ini, khususnya di wilayah pedesaan Sulawesi Selatan dengan dinamika sosial-budaya yang khas.

Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya kajian yang berfokus pada bagaimana kebijakan publik benar-benar bekerja di level akar rumput. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam menangani patologi sosial berupa judi sabung ayam di Desa Teppo, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi keberlanjutan praktik tersebut. Tujuan ini penting untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara kapasitas implementasi kebijakan, dinamika sosial-budaya, dan perilaku masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi teoretis dan praktis: memperkaya kajian administrasi publik mengenai efektivitas kebijakan sosial, sekaligus memberikan dasar empiris bagi pemerintah daerah untuk merumuskan strategi penanganan patologi sosial yang lebih adaptif, responsif, dan kontekstual.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran empiris mengenai implementasi kebijakan pemerintah dalam menangani patologi sosial, khususnya praktik judi sabung ayam di Desa Teppo. Pendekatan ini relevan untuk mengukur variabel penelitian secara sistematis melalui instrumen terstruktur, sebagaimana dianjurkan dalam penelitian kuantitatif berbasis survei (Creswell W John, 2021).

Penelitian dilaksanakan pada Mei–Juni 2025 di Desa Teppo, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang. Lokasi penelitian dipilih secara purposif berdasarkan pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan salah satu wilayah yang memiliki intensitas praktik sabung ayam yang cukup tinggi dan relevan dengan fokus kajian. Pendekatan purposif sesuai dengan panduan Sugiyono (2013) yang menyatakan bahwa pemilihan lokasi dapat dilakukan berdasarkan kesesuaian konteks dengan tujuan penelitian.

Populasi penelitian mencakup seluruh warga yang memiliki kartu keluarga di Desa Teppo, berjumlah 362 jiwa. Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh 78 responden sebagai sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, di mana responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang dinilai mampu memberikan informasi terkait praktik judi sabung ayam dan kebijakan penanganannya.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan tiga teknik utama, yaitu: observasi, kuesioner, dan wawancara singkat. Observasi digunakan untuk mengamati fenomena lapangan, sebagaimana dianjurkan oleh Santoso & Madiistriyatno (2021) sedangkan kuesioner digunakan untuk mengukur variabel implementasi kebijakan dan patologi sosial berdasarkan skala Likert. Instrumen kuesioner disusun dengan merujuk pada indikator implementasi kebijakan Indrajit, yang meliputi ketersediaan sumber daya, kejelasan pedoman pelaksanaan, aksesibilitas data dan informasi, kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan rencana, serta dampaknya terhadap perilaku dan kesejahteraan masyarakat. Wawancara singkat dilakukan untuk memberikan informasi tambahan yang memperkuat temuan kuantitatif.

Data dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics 27 melalui tiga tahap utama: uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis regresi linear sederhana. Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap item instrumen mampu mengukur variabel yang dimaksud, sejalan dengan pedoman validitas instrumen. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan nilai Cronbach's Alpha untuk memastikan konsistensi internal instrumen. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan terhadap penanganan patologi sosial, sebagaimana dijelaskan dalam prosedur analisis statistik. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi jawaban pada setiap indikator.

Seluruh tahapan penelitian dirancang untuk memastikan kualitas data yang diperoleh, kesesuaian metode dengan tujuan penelitian, serta kemampuan analisis dalam memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani patologi sosial di Desa Teppo.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan 78 responden dari Desa Teppo yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Karakteristik responden menunjukkan bahwa keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap praktik sabung ayam cukup tinggi, sehingga relevan sebagai sumber data penelitian. Mayoritas responden berada pada rentang usia produktif (20–39 tahun) dan memiliki tingkat pendidikan menengah, menunjukkan bahwa persepsi terhadap praktik perjudian tidak semata-mata dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan, tetapi oleh dinamika sosial dan budaya lokal.

Uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian menunjukkan bahwa seluruh item memiliki nilai korelasi di atas batas minimum 0,30 dan nilai Cronbach's Alpha pada variabel penelitian berada di atas 0,70. Hal ini menegaskan bahwa instrumen yang digunakan layak dan konsisten dalam mengukur variabel implementasi kebijakan dan patologi sosial.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab utama praktik judi sabung ayam sebesar 42,4%, disusul oleh faktor budaya 25,6%, faktor sosial 19,2%, dan lemahnya pengawasan 12,8%. Temuan ini menggambarkan bahwa motivasi ekonomi menjadi alasan paling dominan bagi masyarakat untuk terlibat dalam sabung ayam, sementara pelestarian tradisi menjadi faktor penguat yang memfasilitasi keberlangsungannya.

Analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penanganan patologi sosial, dengan nilai t hitung sebesar 2,307, lebih besar dari t tabel 1,668, dan tingkat signifikansi 0,024 ($< 0,05$). Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin baik implementasi kebijakan, semakin besar peluang pemerintah mengurangi intensitas praktik sabung ayam.

Tabel 1

Hasil Persamaan Regresi Linear Sederhana
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.165	1.510		8.719	.000
	Implementasi	.124	.054	.256	2.307	.024

a. Dependent Variable: Patologi

Hasil uji t menunjukkan:

- t hitung = 2,307

- $t_{\text{tabel}} = 1,668$ ($\alpha = 0,05$; $df = 76$)

- $\text{Sig.} = 0,024$

Karena nilai t hitung $> t$ tabel dan $\text{sig.} < 0,05$, maka terdapat pengaruh signifikan antara implementasi kebijakan pemerintah dan penanganan patologi sosial di Desa Teppo. Ini berarti hipotesis penelitian (H_a) diterima.

Tabel 2 Hasil Uji t
Coefficientsa

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.165	1.510		8.719	.000
	Implementasi	.124	.054	.256	2.307	.024

a. Dependent Variable: Patologi

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai:

- $R^2 = 0,065$

Nilai ini mengindikasikan bahwa 6,5% variasi perubahan dalam penanganan patologi sosial dapat dijelaskan oleh variabel implementasi kebijakan pemerintah. Sementara 93,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian, seperti aspek ekonomi, budaya, sosial, dan lemahnya pengawasan aparat.

Nilai R^2 yang relatif kecil menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pemerintah memiliki pengaruh signifikan, tetapi implementasi kebijakan bukan satu-satunya determinan yang menentukan keberhasilan penanganan judi sabung ayam. Hal ini memperkuat temuan lapangan bahwa faktor ekonomi dan budaya memiliki pengaruh yang lebih besar dalam mendorong terjadinya praktik perjudian tersebut.

Tabel 3 Hasil Uji Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.256 ^a	.065	.053	2.437

a. Predictors: (Constant), Implementasi

Hasil deskriptif pada penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi adalah penyebab dominan keberlangsungan praktik judi sabung ayam di Desa Teppo (42,4%), diikuti faktor budaya (25,6%), faktor sosial (19,2%), dan lemahnya pengawasan (12,8%). Data empiris lokal ini (sasaran = 78 responden) menjadi titik awal penting untuk memahami motif partisipasi masyarakat dalam praktik perjudian tradisional dan menegaskan bahwa motivasi ekonomi menempati urutan utama di samping legitimasi kultural yang menopang praktik tersebut. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian lapangan pada konteks pedesaan yang menunjukkan bahwa tekanan ekonomi—termasuk kebutuhan pendapatan alternatif dan keterbatasan kesempatan kerja—sering mendorong individu berpartisipasi dalam aktivitas perjudian sebagai strategi penghasilan atau hiburan berbayar.

Secara makro, pola bahwa tekanan ekonomi meningkatkan risiko keterlibatan dalam praktik perjudian memiliki dukungan literatur internasional dan regional. Kajian empiris mutakhir menunjukkan prevalensi perjudian bermasalah cukup tinggi dan berkaitan erat dengan faktor-faktor sosio-ekonomi; penelitian kuantitatif lintas-negara dan review sistematis menemukan bahwa kerentanan ekonomi, aksesibilitas permainan, dan literasi keuangan berperan penting dalam mempengaruhi tingkat perilaku perjudian bermasalah. Hal ini menggarisbawahi bahwa intervensi yang hanya bersifat represif belum memadai tanpa langkah-langkah ekonomi-struktural yang mengurangi insentif ekonomi untuk berjudi (Tran et al., 2024).

Temuan bahwa aspek budaya (25,6%) turut menguatkan praktik sabung ayam merefleksikan dimensi simbolik dan legitimasi sosial dari kegiatan tersebut: sabung ayam kerap dipersepsikan sebagian masyarakat sebagai tradisi, arena sosialisasi, atau praktik budaya yang menempel pada identitas kelompok. Literatur antropologis dan kajian budaya memperingatkan bahwa saat norma hukum bertentangan dengan nilai lokal, penegakan hukum tanpa pendekatan kultural sering menimbulkan resistensi atau sekadar “penertiban administratif” yang tak mengubah praktik di akar rumput. Oleh karena itu, upaya pengendalian patologi sosial seperti sabung ayam perlu memasukkan strategi dialog kultural dan kerja sama dengan pemimpin adat/agama setempat agar kebijakan mendapat legitimasi sosial (Gustaman, 2025).

Temuan bahwa lemahnya pengawasan tercatat (12,8%) dan bahwa variabel implementasi kebijakan menjelaskan hanya sebagian kecil (R^2 rendah) dari variasi praktik (lihat hasil regresi) menunjukkan adanya implementation gap: regulasi yang ada belum berhasil diterjemahkan ke tindakan efektif di tingkat lokal. Temuan ini selaras dengan literatur implementasi kebijakan yang menegaskan bahwa faktor kontekstual (kapasitas institusi, sumber daya, jaringan antar-aktor, dan disposisi pelaksana) menentukan outcome kebijakan lebih kuat daripada sekedar keberadaan regulasi formal. Dalam konteks Indonesia, studi-studi evaluatif menyorot masalah

serupa—keterbatasan anggaran operasional, kapasitas aparat, dan koordinasi lintas-sektoral menghambat efektivitas program sosial di tingkat desa dan kabupaten. Oleh karena itu, penting melihat kegagalan pengendalian sabung ayam sebagai masalah implementasi yang memerlukan intervensi kelembagaan, bukan hanya tindakan hukum (Kurnianingsih et al., 2020).

Kaitannya dengan kebijakan publik: temuan empiris ini mengindikasikan bahwa respons kebijakan perlu bersifat multi-dimensi—menggabungkan penegakan hukum, pemberdayaan ekonomi, dan pendekatan berbasis komunitas. Bukti dari kajian intervensi populasi menyarankan bahwa program pencegahan berbasis masyarakat (co-design), pendidikan/literasi finansial, dan penawaran alternatif ekonomi/hiburan lebih efektif mengurangi dampak perjudian bila dirancang bersama aktor lokal. Intervensi yang berfokus pada penguatan kapasitas ekonomi rumah tangga (pelatihan keterampilan, akses modal mikro, program padat karya lokal) serta program pencegahan yang melibatkan sekolah dan tokoh lokal telah menunjukkan hasil positif pada studi-studi regional dan internasional. Ini mendukung argumen bahwa kebijakan sektoral (mis. penegakan hukum) harus dikombinasikan dengan kebijakan ekonomi-sosial yang mengurangi “push factors” ekonomi menuju perjudian (Clune et al., 2024).

Terakhir, pembahasan ini menegaskan bahwa respons kebijakan yang efektif harus memasukkan desain implementasi yang realistis: alokasi sumber daya yang memadai untuk patroli dan penegakan, mekanisme koordinasi lintas-instansi (desa, kecamatan, kepolisian, dinas sosial), serta strategi komunikasi kebijakan yang sensitif budaya. Pendekatan adaptive governance—yang mengkombinasikan pengawasan hukum, pemberdayaan ekonomi, dan proses ko-desain program pencegahan bersama komunitas—sejalan dengan bukti terbaik saat ini untuk mengurangi praktik perjudian bermasalah, terutama di area pedesaan yang memiliki kekhasan budaya.

Tabel 1. Faktor Penyebab Judi Sabung Ayam di Desa Teppo

Faktor Penyebab	Persentase (%)	Interpretasi Singkat
Ekonomi	42,4%	Dorongan utama terkait kebutuhan penghasilan dan tekanan ekonomi rumah tangga
Budaya	25,6%	Praktik dianggap tradisi/hiburan turun-temurun; legitimasi kultural kuat
Sosial	19,2%	Dorongan interaksi sosial, pengaruh kelompok, gengsi

Lemah Pengawasan	12,8%	Aparat tidak konsisten, minim patroli, tidak ada tindakan berkelanjutan
-------------------------	-------	---

Temuan statistik melalui uji t menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap penanganan patologi sosial berupa praktik judi sabung ayam di Desa Teppo ($t_{\text{hitung}} = 2,307 > t_{\text{tabel}} = 1,668$; $\text{sig.} = 0,024$). Hasil ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan publik di tingkat desa dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi atau membatasi ruang gerak praktik-praktik perjudian tradisional yang berkembang di masyarakat.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Uji	Statistik	Nilai	Interpretasi
	t hitung	2,307	Ada pengaruh signifikan implementasi kebijakan terhadap penanganan patologi sosial
	t table	1,668	Kriteria pembandingan
	Sig.	0,024	$< 0,05 \rightarrow$ signifikan
	R Square	0,065	Implementasi kebijakan menjelaskan 6,5% variasi penanganan patologi sosial

Pengaruh Implementasi Kebijakan Berdasarkan Variabel Edward III

Sesuai dengan teori Edward III (Edwards, 1980), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama:

- Komunikasi kebijakan
- Sumber daya
- Disposisi pelaksana
- Struktur birokrasi

Temuan regresi pada penelitian ini memperlihatkan bahwa beberapa aspek ini telah berjalan tetapi belum optimal. Misalnya, komunikasi kebijakan terkait pelarangan sabung ayam telah dilakukan, namun sosialisasi yang terbatas dan informasi yang tidak merata membuat sebagian masyarakat tetap menganggap sabung ayam sebagai hiburan yang tidak berbahaya. Literatur terbaru menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi kebijakan di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh kedekatan aparat dengan warga, serta penyampaian kebijakan melalui struktur informal seperti tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga komunitas (Prayitno, 2024).

Aspek sumber daya juga memiliki peran penting. Keterbatasan aparatur desa, minimnya dana operasional, dan kurangnya fasilitas pengawasan membuat implementasi kebijakan berjalan tidak maksimal. Studi yang dilakukan oleh Asha (2014) menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan desa sangat dipengaruhi oleh kompetensi aparatur dan kecukupan sumber daya birokrasi.

Relevansi Temuan dengan Model Implementasi Grindle

Menurut Grindle (2017), implementasi kebijakan ditentukan oleh dua kelompok faktor:

Isi kebijakan (content of policy)

Konteks implementasi (context of implementation)

Nilai R Square sebesar 0,065 mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan pemerintah memang berpengaruh, tetapi pengaruh tersebut relatif kecil karena konteks implementasi lebih dominan dibanding isi kebijakan itu sendiri. Dalam kasus Desa Teppo, hambatan utama berupa budaya permisif, struktur sosial yang kuat, serta lemahnya pengawasan menjadi bagian dari konteks implementasi yang memperlemah efektivitas kebijakan.

Pendekatan Grindle mendapatkan dukungan kuat dari temuan mutakhir dalam studi kebijakan publik di tingkat lokal. Penelitian Reese & Cox (2007) menunjukkan bahwa kebijakan desa cenderung tidak efektif apabila tidak selaras dengan nilai budaya komunitas serta tidak memperhitungkan resistensi sosial. Ini sejalan dengan kondisi Desa Teppo, di mana sabung ayam dipandang bukan sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai aktivitas sosial yang “wajar” dan melekat pada identitas kelompok.

Kesesuaian Temuan dengan Indikator Implementasi (Indrajit)

Instrumen penelitian menggunakan indikator implementasi kebijakan dari Indrajit, yaitu:

ketersediaan sumber daya

kejelasan pedoman

ketersediaan informasi

pelaksanaan sesuai rencana

perubahan perilaku Masyarakat

peningkatan kualitas hidup

peningkatan kesejahteraan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa beberapa indikator administrasi—seperti pedoman, rencana, dan data—telah tersedia, tetapi dampak terhadap perubahan perilaku dan kualitas hidup masih terbatas. Ini sejalan dengan nilai R Square yang rendah, yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan baru berkontribusi kecil dalam mengubah perilaku perjudian masyarakat.

Penelitian terbaru oleh Nurdin et al., (2022) menguatkan bahwa indikator implementasi yang bersifat struktural (pedoman, prosedur, administrasi) sering berjalan lebih cepat dibanding indikator yang bersifat sosial (perubahan perilaku, penurunan penyimpangan), sehingga gap implementasi sering kali terjadi.

Integrasi Temuan: Kebijakan Berpengaruh, tetapi Dibatasi Konteks Budaya dan Ekonomi

Meskipun kebijakan berpengaruh secara signifikan, faktor ekonomi dan budaya yang dominan (42,4% dan 25,6%) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat berdiri sendiri dalam mengatasi patologi sosial. Kebijakan yang bersifat represif—seperti pelarangan dan penertiban—tidak mampu mengubah perilaku apabila tidak didukung oleh:

- intervensi ekonomi (peluang kerja, program UMKM, bantuan modal)
- intervensi budaya (kolaborasi dengan tokoh adat/agama)
- dukungan sosial (edukasi risiko perjudian)
- pengawasan yang konsisten.

Penelitian terbaru mendukung strategi holistik ini. Studi oleh Haris & Saleh (2023) pada kasus perjudian di wilayah pedesaan Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa penurunan praktik perjudian hanya terjadi ketika intervensi hukum berjalan bersamaan dengan program pemberdayaan ekonomi, edukasi sosial, dan dukungan komunitas. Temuan-ke-temuan ini menegaskan bahwa pengaruh kebijakan yang signifikan harus didukung dengan perubahan struktur sosial dan ekonomi agar efektif secara jangka Panjang (Dickson-Gillespie et al., 2008; Mills et al., 2024).

Tabel 3. Keterkaitan Temuan Penelitian dengan Teori Implementasi Kebijakan

Teori Indikator	/	Temuan Empiris	Interpretasi Analitis
Edward III – Komunikasi	–	Informasi kebijakan tidak merata	Komunikasi lemah mengurangi efektivitas implementasi
Edward III – Sumber daya	–	Aparat terbatas, pengawasan minim	Keterbatasan SDM menurunkan efektivitas pengendalian
Indrajit – Ketersediaan Data	–	Data & pedoman tersedia tetapi kurang dimanfaatkan	Implementasi berjalan administratif, tidak substantif
Grindle – Konteks Implementasi	–	Budaya permisif & tekanan ekonomi dominan	Faktor konteks lebih kuat pengaruhnya daripada kebijakan
Indrajit – Dampak Kebijakan	–	Perubahan perilaku rendah	Mendukung R ² rendah (kontribusi kebijakan 6,5%)

Temuan bahwa kebijakan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penanganan patologi sosial mengonfirmasi teori Edward III, Grindle, dan Indrajit. Namun, rendahnya nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan hanya menjadi salah satu faktor dari banyak determinan lain yang

mempengaruhi keberlangsungan sabung ayam. Oleh karena itu, kebijakan publik dalam konteks Desa Teppo harus mengintegrasikan pendekatan struktural, kultural, dan ekonomi untuk menghasilkan perubahan yang lebih substantif.

KESIMPULAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberlangsungan praktik judi sabung ayam di Desa Teppo disebabkan oleh faktor ekonomi sebagai pendorong utama (42,4%), disusul faktor budaya (25,6%), faktor sosial (19,2%), dan lemahnya pengawasan (12,8%). Secara empiris, hal ini menegaskan bahwa patologi sosial tidak hanya dipengaruhi oleh aspek legalitas, tetapi juga oleh struktur ekonomi masyarakat pedesaan, legitimasi budaya, serta dinamika sosial yang memandang sabung ayam sebagai aktivitas hiburan dan identitas kolektif. Faktor-faktor ini menjadi tantangan signifikan bagi pemerintah desa karena intervensi kebijakan yang bersifat normatif tidak cukup kuat untuk mengatasi praktik yang telah berakar dalam nilai sosial dan tradisi lokal. Temuan ini mengimplikasikan perlunya kebijakan publik yang lebih adaptif dan integratif, menggabungkan pendekatan pemberdayaan ekonomi, intervensi kultural, pendidikan sosial, dan peningkatan kapasitas pengawasan di tingkat desa.

Temuan regresi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap penanganan patologi sosial dengan nilai t hitung 2,307 (sig. 0,024), namun nilai koefisien determinasi ($R^2 = 0,065$) mengindikasikan bahwa kontribusi kebijakan terhadap perubahan perilaku masyarakat masih sangat terbatas. Artinya, implementasi kebijakan—meskipun penting—baru mampu menjelaskan sebagian kecil variasi penurunan praktik sabung ayam, sementara faktor lain seperti tekanan ekonomi, legitimasi budaya, dan struktur sosial memberikan pengaruh yang lebih besar. Berdasarkan teori Edward III, Grindle, dan Indrajit, efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, kekuatan konteks, serta kesesuaian implementasi dengan nilai lokal. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan publik di Desa Teppo harus memperkuat kapasitas implementasi dan mengintegrasikan pendekatan struktural, kultural, dan ekonomi agar mampu menghasilkan perubahan sosial yang lebih substantif.

REFERENSI

- Asha, A. (2014). Capacity challenges for local government efficacy for development planning and implementation | *Journal of Public Administration. Journal of Public Administration*, 49(3). <https://journals.co.za/doi/abs/10.10520/EJC164769>
- Basuki, W., & Sudrajat, A. (2017). Praktik Sosial Sabung Ayam Di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu. *Paradigma*, 5(1). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/18196>
- Clune, S., Ratnaike, D., White, V., Donaldson, A., Randle, E., O'Halloran, P., & Lewis,

- V. (2024). What is known about population level programs designed to address gambling-related harm: rapid review of the evidence. *Harm Reduction Journal*, 21(1), 118. <https://doi.org/10.1186/S12954-024-01032-8>
- Creswell W John. (2021). *A Concise Introduction to Mixed Methods Research - John W. Creswell - Google Buku*. SAGE Publication.
[https://books.google.co.id/books?id=2s0IEAAAQBAJ&dq=Creswell,+J.+W.+\(2014\).+A+concise+introduction+to+mixed+methods+research.+SAGE+Publications&lr=&hl=id&source=gbs_navlinks_s](https://books.google.co.id/books?id=2s0IEAAAQBAJ&dq=Creswell,+J.+W.+(2014).+A+concise+introduction+to+mixed+methods+research.+SAGE+Publications&lr=&hl=id&source=gbs_navlinks_s)
- Dickson-Gillespie, L., Rugle, L., Rosenthal, R., & Fong, T. (2008). Preventing the Incidence and Harm of Gambling Problems. *The Journal of Primary Prevention* 2008 29:1, 29(1), 37–55. <https://doi.org/10.1007/S10935-008-0126-Z>
- Edwards, G. C. . (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (2017). Politics and Policy Implementation in the Third World. In *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
<https://doi.org/10.1515/9781400886081-012>
- Gustaman, B. (2025). Di Balik Arena Pertarungan dan Pertaruhan: Historisitas Sabung Ayam Berdasarkan Narasi Sumber Lokal dan Kolonial. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 9(2), 239–256. <https://doi.org/10.29408/FHS.V9I2.30586>
- Hardiyanto, S., Romadhona, E. S., Muhammadiyah, U., & Selatan, T. (2018). REMAJA DAN PERILAKU MENYIMPANG. *Jurnal Interaksi : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 23–32. <https://doi.org/10.30596/INTERAKSI.V2I1.1785>
- Hisyam, C. J. (2021). *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis* (B. S. Fatmawati (ed.)). PT Bumi Aksara.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ALdTEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=perilaku+menyimpang&ots=SgO5H--4Ki&sig=LGo0MkMpUKt9iHv-wJtSEpRDkxc&redir_esc=y#v=onepage&q=perilaku+menyimpang&f=false
- Kurnianingsih, F., Mahadiansar, M., & Setiawan, R. (2020). Implementation Processes of Social Protection Policy in Indonesia: Study of Prakerja Card Program. *Journal of Governance and Public Policy*, 7(3), 247–259.
<https://doi.org/10.18196/jgpp.731337>
- Mills, T., Evans, J., Jenkins, C. L., Grimes, J., Reavey, P., Wills, J., & Sykes, S. (2024). Galvanising social innovation in gambling harms reduction: a process evaluation of a multi-component Community of Practice. *Global Health Promotion*.
<https://doi.org/10.1177/17579759241293453;WGROU:STRING:PUBLICATION>
- Nurdin, N., Scheepers, H., & Stockdale, R. (2022). A social system for sustainable local e-government. *Journal of Systems and Information Technology*, 24(1), 1–31.
<https://doi.org/10.1108/JSIT-10-2019-0214>
- Prayitno, A. (2024). LOCAL POLITICAL COMMUNICATION STRATEGY IN IMPROVING VILLAGE PUBLIC SERVICE PERFORMANCE. *Jurnal Wacana Politik*, 9(3), 333. <https://doi.org/10.24198/JWP.V9I3.56844>
- Reese, L. A., & Cox, D. S. (2007). Local culture and governmental change: The

endurance of culture in the face of structural change. *Canadian Public Administration*, 50(2), 245–271. <https://doi.org/10.1111/J.1754-7121.2007.TB02012.X>;REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:17547121;ISSUE:ISSUE:DOI

Santoso, I., & Madiistriyatno, H. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Indigo Media.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=bRFTEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Metodologi+penelitian+kuantitatif&ots=4k-CqfqSRh&sig=abFIg_RRTJt5TU_X21--l6aYSzM&redir_esc=y#v=onepage&q=Metodologi penelitian kuantitatif&f=false

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Tran, L. T., Wardle, H., Colledge-Frisby, S., Taylor, S., Lynch, M., Rehm, J., Volberg, R., Marionneau, V., Saxena, S., Bunn, C., Farrell, M., & Degenhardt, L. (2024). The prevalence of gambling and problematic gambling: a systematic review and meta-analysis. *The Lancet Public Health*, 9(8), e594–e613.
[https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(24\)00126-9](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(24)00126-9)

Wagey, C. G. (2020). PENERTIBAN PERJUDIAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA INDONESIA (Analisis Pasal 303 KUHPidana Jo UU No 7 Tahun 1974). *LEX CRIMEN*, 9(3).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/29838>